



# Michael Beberkan 3 Prioritas APBD DKI

- ▶ Rp 83,7 Triliun Utamakan Banjir, Macet, dan Masalah Ekonomi
- ▶ Heru Budi Garibawahi Pentingnya Kemitraan DPRD dan Pemprov

### Kebon Sirih, Warta Kota

DPRD DKI Jakarta mengesahkan rancangan peraturan daerah (raperda) APBD DKI Jakarta tahun anggaran 2023 pada Selasa (29/11/2022).

Pengesahan RAPBD DKI 2023 senilai

Rp 83,7 triliun yang dilakukan di Ruang Rapat Paripurna Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat kemarin siang itu akan difokuskan untuk tiga program prioritas.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan

Daerah (BPKD) DKI Jakarta Michael Rolandi Cesnanta Brata mengatakan, alokasi untuk tiga program prioritas itu sebanyak 41,27 persen dari RAPBD DKI 2023.

"RAPBD (DKI) 2023 difokuskan pada tiga program prioritas dengan alokasi sebesar 41,27 persen melalui belanja dan penyertaan modal daerah (PMD)," ucap Michael dalam keterangannya, Selasa (29/11/2022).

"Pertama, pengendalian banjir; kedua, penanganan kemacetan; dan ketiga, antisipasi dampak penurunan pertumbuhan ekonomi," sambungnya.

Dipaparkan, kegiatan prioritas dalam pengendalian banjir antara lain untuk pembangunan infrastruktur program antisipasi banjir.

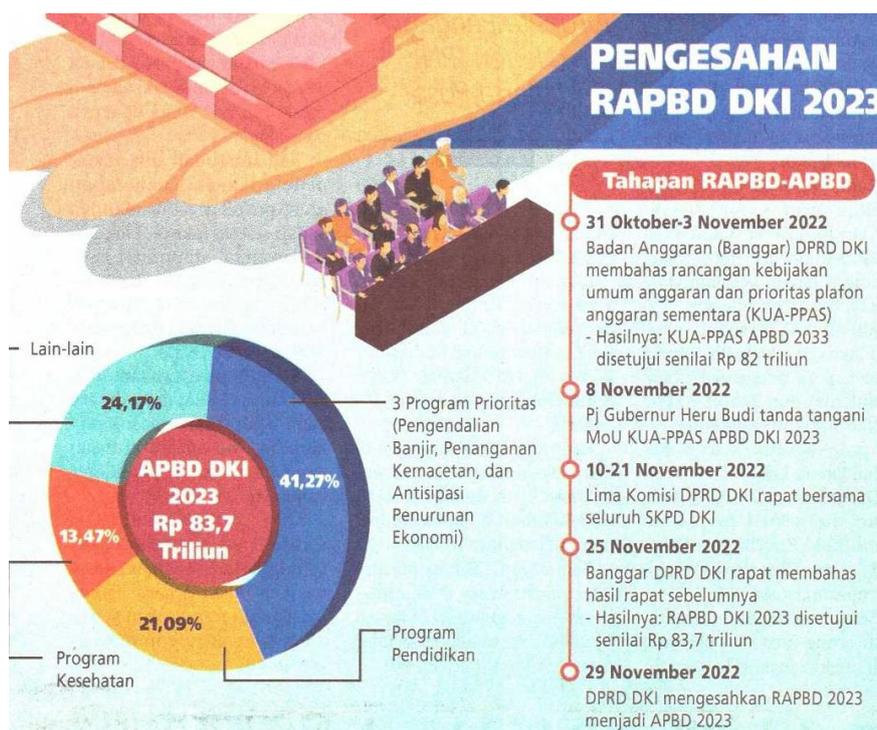
"Pembangunan infrastruktur yang dimaksud seperti pembangunan waduk, tang-



Leonardus Wical ZA

**RAPBD DKI 2023** — Sidang Paripurna DPRD DKI Jakarta mengesahkan RAPBD DKI 2023 di Gedung DPRD, Kebon Sirih, Jakarta, Selasa (29/11/2022). APBD yang ditetapkan Rp 83,7 triliun diutamakan untuk tiga program prioritas, yaitu banjir, macet, dan masalah ekonomi.

*(Bersambung ke hlm 11)*





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Warta Kota

## Michael Beberkan 3 Prioritas APBD DKI

gul pengamanan pantai, pengadaan pompa dan pintu air, dan lainnya, serta kegiatan operasional dan pascabencana berupa perawatan pompa banjir, saluran drainase, pengelolaan ruang terbuka hijau, dan lain-lain," jelas Michael.

Sementara itu, ada juga kegiatan prioritas dalam penanganan kemacetan antara lain untuk pembangunan infrastruktur pengurai kemacetan.

"Contohnya adalah proyek MRT, LRT, dan lainnya, serta kegiatan operasional seperti penyaluran subsidi operasional Transjakarta, MRT, LRT, pelayanan angkutan bus sekolah, dan lain-lain," paparnya.

### Subsidi pangan

Michael menambahkan, sedangkan kegiatan prioritas dalam rangkaantisipasi dampak resesi ekonomi antara lain untuk penyaluran pangan murah (subsidi pangan), Kartu Jakarta Pintar (KJP), dan Kartu Lansia Jakarta (KLJ).

Kemudian, ada juga Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ), Kartu Anak Jakarta (KAJ), Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) bagi peserta didik di seluruh jenjang, serta penyaluran bantuan di bidang kesehatan, tenaga kerja, pariwisata, dan sebagainya.

Pemprov DKI Jakarta bekerja dengan semangat 'Pemulihan dan Transformasi Menuju Ekonomi Digital dalam rangka Pemantapan Kota Global yang Berdaya Saing' sejak proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2023.

"Hingga pada titik akhir penetapan APBD Tahun Anggaran 2023, Pemprov DKI Jakarta selalu menjaga keselarasan serta konsistensi terhadap program-program prioritas yang sudah disusun dalam dokumen perencanaan dan pelaksanaan major project yang telah tertuang dalam Proyek Strategis Nasional Tahun 2023," urai Michael.

### Pendidikan dan Kesehatan

Dia menambahkan, sebanyak 21,09 persen dari RAPBD DKI 2023 akan dialokasikan untuk belanja pendidikan. Persentase ini, kata Michael, telah disesuaikan dengan amanat Pasal 31 Ayat 4 Undang-undang Dasar (UUD) Tahun 1945. Dalam pasal itu, anggaran pendidikan sedikitnya 20 persen dari APBD.

"Alokasi terhadap belanja pendidikan

2023), sesuai dengan amanat Pasal 31 Ayat 4 UUD 1945 bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBD," tuturnya.

Michael melanjutkan, sebanyak 13,47 persen dari RAPBD DKI 2023 dialokasikan untuk pelayanan kesehatan. Menurut dia, persentase itu telah disesuaikan dengan UU Nomor 36 Tahun 2009, yang pada intinya anggaran kesehatan dialokasikan minimal 10 persen dari APBD.

"Kemudian, alokasi terhadap standar pelayanan minimal kesehatan sebesar 13,47 persen (dari) APBD (DKI 2023)," ungkapnya.

### Program lain

Selain itu, Rancangan APBD Tahun Anggaran 2023 juga menunjang prioritas daerah lainnya, antara lain:

1. Layanan dasar perkotaan, antara lain penanggulangan sampah, penyediaan air bersih, pengolahan air limbah, dan akses hunian layak;
2. Keruangan, antara lain penataan ruang, ruang terbuka hijau, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, dan ekosistem pesisir;
3. Ekonomi, antara lain mempertahankan keberhasilan pertumbuhan ekonomi Jakarta;
4. Pemberian bantuan sosial dan pelayanan publik.

### Tak ada perubahan nominal

Dalam sidang paripurna kemarin, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mulanya bertanya kepada para anggota DPRD DKI Jakarta apakah Raperda APBD DKI 2023 dapat disetujui menjadi Perda APBD DKI 2023.

"Kepada anggota badan rapat, kami ingin menanyakan, forum terhormat, apakah Raperda tentang APBB DKI 2023 untuk ditetapkan menjadi Perda dapat disetujui?" tanya Prasetyo.

"Setuju," jawab para anggota DPRD DKI. Prasetyo lantas mengetok palu sebanyak tiga kali. Dalam Raperda yang telah disahkan itu, APBD DKI 2023 disetujui senilai Rp 83,7 triliun. Tak ada perubahan nominal antara RAPBD DKI 2023 dengan APBD DKI 2023.

Adapun pengesahan ini turut disaksikan para Wakil Ketua DPRD DKI, yakni Rani Mauliani, Khoirudin, Misan Samsuri, dan Zita Anjani.

### Semangat kemitraan

Penjabat (PJ) Gubernur DKI Jakarta

Heru Budi Hartono juga menyaksikan pengesahan Raperda APBD DKI 2023 itu.

"Jajaran eksekutif akan menindaklanjuti berbagai saran, komentar dan rekomendasi dewan yang disampaikan selama proses pembahasan, penyelesaian dan persetujuan Perda ini," ujar Heru dalam pidatonya, Selasa (29/11/2022).

Dengan persetujuan DPRD atas APBD Tahun anggaran 2023, Pemprov DKI Jakarta berharap dapat terus meningkatkan sinergi, memfokuskan, dan mengoptimalkan berbagai program kerja strategis. Di mana program kerja tersebut dapat bermanfaat bagi masyarakat DKI Jakarta.

"Mudah-mudahan tahun 2023 menjadi tahun di mana perekonomian Jakarta terus meningkat dan seluruh program dan kegiatan berjalan sesuai rencana," ucap Heru.

Heru kembali menggarisbawahi pentingnya menjaga dan mengimplementasikan nilai-nilai semangat kemitraan antara DPRD dengan Pemprov DKI Jakarta. Di mana memang kemitraan tersebut telah terbina dengan sangat baik selama ini secara proporsional dan profesional, sehingga dapat terus dilanjutkan saat waktu-waktu mendatang.

Heru pun mengapresiasi DPRD DKI Jakarta yang telah memberikan persetujuan terhadap Perda tentang APBD tahun anggaran 2023.

### Tahapan

Untuk diketahui, pembahasan berkait APBD DKI tahun anggaran 2023 telah melewati beberapa tahap.

Pada 31 Oktober-3 November 2022, Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI membahas rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) untuk APBD 2023 di Grand Cempaka, Bogor, Jawa Barat. Hasilnya, KUA-PPAS APBD 2023 disetujui senilai Rp Rp 82.543.539.889.450 (Rp 82 triliun).

Kemudian, Heru Budi menandatangani nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) KUA-PPAS APBD DKI 2023, 8 November 2022.

Lima Komisi DPRD DKI lalu menggelar rapat bersama seluruh SKPD DKI tentang RAPBD DKI 2023 pada 10-21 November 2022.

Hasil rapat bersama ini lalu dibahas oleh Banggar DPRD DKI pada 25 November 2022. Hasil rapat Banggar, RAPBD DKI 2023 disetujui senilai Rp 83,7 triliun. (m36)